



LAKIP 2021

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

**Inspektorat
Kabupaten Polewali Mandar**



KATA PENGANTAR

INSPEKTUR

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH, MM

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Laporan Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 disusun sebagai bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan pengendalian dan kepastian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Laporan Capaian Kinerja sekaligus merupakan bagian dari tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategi yang telah dirumuskan. Perjanjian SAKIP Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi pertimbangan untuk keberlanjutan. Kebijakan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar yang semakin profesional dan andal dalam memberikan dukungan manajemen Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak khususnya Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya, yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Polewali 15 Februari 2022

INSPEKTUR

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I p : 19651231 200003 1 058

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengukuran pelaksanaan kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan dalam Untuk pengukuran kinerja sesuai dengan indikator kinerjanya masih ada beberapa yang tingkat capaiannya belum mencapai target seperti luas kawasan kumuh dengan tingkat capaian hanya menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini terpapar dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan untuk menilai dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / misi organisasi selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat. hal tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara umum, capaian kinerja yang telah ditargetkan untuk setiap sasaran maupun kegiatan telah dicapai melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan rencana pencapaian target dengan realisasi pencapaiannya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2021 menunjukkan bahwa pencapaian kinerja kegiatan secara keseluruhan terlaksana dengan kategori cukup baik, penyerapan anggaran sebesar 98,37%,

Dimana pada tahun 2020 ini dana yang dianggarkan sebesar Rp.6.193.093.234.00,- yang terdiri dari 3 program dan 35 kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 6.152.111.071.00,- atau sekitar 98,57%. Pada tahun ini masih ada beberapa indikator yang belum memenuhi target capaian, dimana Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan rencana anggaran Rp.15.000.000.00,- dianggarkan. Hal ini ada perubahan nomenklatur kelembagaan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga kegiatan tersebut mengalami perubahan.

Walau dengan keterbatasan tersebut, dimasa mendatang kami tetap berharap kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar makin meningkat, sehingga Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar untuk mewujudkan yang Handal dan Merata dalam Menunjang Peningkatan Perekonomian Daerah Menuju Terciptanya *Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera 2021 Dapat Tercapai.*

Polewali, Februri 2022

INSPEKTUR

H.Ahmad Saifuddin,SH,MM

Daftar Isi

Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah..	
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah ...	
1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah	
1.4 Dasar Hukum	
1.5 Sistematika Penulisan	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
2.2 Tujuan Perangkat Daerah	
2.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	
2.3 Perencanaan Kinerja <u>Perangkat</u> Daerah	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja.....	
3.3. Akuntabilitas Keuangan	
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum OPD

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan data kepegawaian Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 jumlah pegawai sebanyak 48 orang yang terdiri dari 8 orang pejabat struktural , Pejabat Fungsional/Auditor 35 orang staf dan 8 orang JFU. Staf/PTT 13 orang Kondisi sumber daya manusia pada Inspektorat kabupaten polewali mandar dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Golongan	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional		
	S2	31	IV/c	2	Eselon II.a	1
	S1	14	IV/b	10	Eselon III.a	5
	D3	-	IV/a	2	Eselon III.b	-
	D2	-	III/d	14	Eselon IV.a	1
	SLTA	1	III/c	6	Eselon IV.b	0
	SLTP	-	III/b	10	Pelaksana (Staf)	8
	SD	-	III/a	2		
			II/d	1		
			II/c	-		
			II/b	-		
			II/a	-		
			I/b	-		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian inspektorat kabupaten polewali mandar 2021

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	PNS	Staf/PTT
1.	48 Orang	14 Orang

b. Perlengkapan / Asset

Secara garis besar perlengkapan / asset yang ada dan dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas 6 bagian yaitu :

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan bangunan,
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam pengerjaan

Tabel 1.3. Rekapitulasi Daftar Aset Inspektorat kabupaten Polewali Mandar

No.	Nama Barang	Nilai	Ket.
1.	Tanah	133.600.000,-	
2.	Peralatan dan Mesin	648..608.378	
	Alat-alat Besar		
	Alat-alat Angkutan		
	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
	Alat Pertanian		
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Alat Studio dan Alat Komunikasi		
	Alat-alat Kedokteran		
	Alat Laboratorium		
	Alat Keamanan		
3.	Gedung dan Bangunan	1,495,600,000,-	
	Bangunan Gedung		
	Monumen		
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	21,652,400,-	
	Jalan dan Jembatan		
	Bangunan Air/ Irigasi		
	Instalasi		
	Jaringan		
5.	Aset Tetap Lainnya	7.000.000,-	
	Buku dan Perpustakaan		
	Barang Bercorak Kebudayaan		
	Hewan dan Ternak serta Tanaman		
	Aset Renovasi		
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-	

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun fungsi dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar adalah unsur pelaksana tugas pemerintah kabupaten dalam bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggungjawab kepada Bupati. Inspektorat merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi

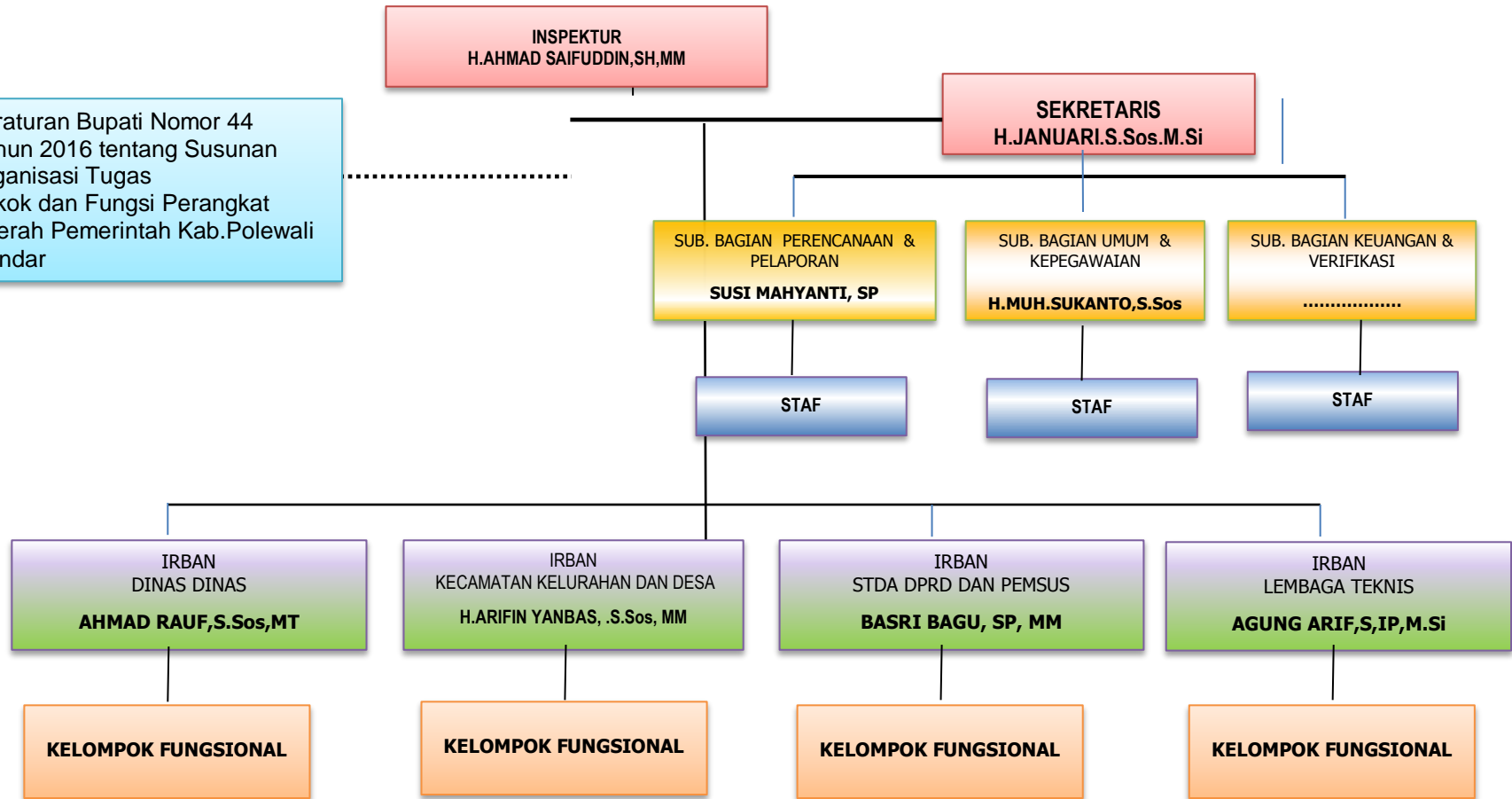
- a. Perumusan Kebijakan Teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris
 - Sub.Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektur Pembantu Pengawasan Sekretariat Daerah, DPRD Dan Penanganan Khusus;
- d. Inspektur Pembantu Pengawasan Dinas-Dinas
- e. Inspektur Pembantu Pengawasan Badan – Badan
- f. Inspektur Pembantu Pengawasan Kecamatan, Kelurahan Dan Desa; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dapat di gambarkan sebagai berikut :

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kab.Polewali Mandar



1.3. Isu Strategis Yang Dihadapi

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Madar (Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/ Badan/ Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lainnya maupun Eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan sinergi pengawasan.

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan Negara.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dibidang pengawasan yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat, yaitu :

1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Adanya tuntutan peningkatan Kapabilitas APIP megakibatkan fungsi dan kewenangan Inspektorat selaku APIP bertambah. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2019-2023 ditargetkan pada tahun 2021 Inspektorat selaku APIP sudah berada pada level 3. Kondisi ini harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan dikudung oleh alokasi anggaran yang memadai.

2. Penerapan SPIP di setiap Perangkat Daerah masih lemah.

Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh Inspektorat maupun BPK merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif serta belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh SKPD. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. APIP juga dituntut melaksanakan penilaian maturitas SPIP pada instansi sesuai dengan target indikator kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2019-2023. Indikator kinerja berupa tingkat kematangan implementasi SPIP ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2021.

3. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah adalah mendapatkan opini WTP dari BPK, maka menjadi tantangan bagi Inspektorat dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk mempertahankan opini WTP dari BPK untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk itu perlu perhatian serius seluruh stakeholder terkait agar peran Inspektorat saat ini dan kedepan dalam melaksanakan Reviu Laporan Keuangan dapat didukung dengan optimal sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Kuantitas Dan Kualitas SDM Yang Belum Memadai

Jumlah SDM bidang pengawasan yang ada saat ini belum memadai untuk melaksanakan pemeriksaan regular, penanganan kasus, dan berbagai tugas pengawasan yang semakin banyak dan menjadi mandat (mandatory) yang harus dilaksanakan seperti reviu dan evaluasi. Kondisi ini memerlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan. Kompetensi untuk melakukan pengawasan dibuktikan dengan kemampuan melakukan audit, reviu, evaluasi, investigasi, pemantauan dan pengawasan lainnya. Untuk itu diperlukan pelatihan dan diklat terhadap SDM bidang pengawasan untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan pengawasan yang semakin berkembang pesat saat ini.

5. Belum Optimalnya Sarana Dan Prasarana Pendukung Kegiatan Pengawasan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat diharapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar sangat memprihatinkan dan jauh dari standar.

Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LAKIP adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023;
 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 8. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023;
 9. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

1.4. Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akan menjelaskan pencapaian kinerja OPD dalam hal ini Inspektorat kabupaten polewali mandar Tahun 2020 untuk menjadi acuan dan perbandingan dalam perbaikan kinerja dimasa mendatang, dibuat dengan sistematika berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 2.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan

BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Kabupaten Polewali Mandar sebagai representasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan merupakan gambaran cita-cita serta harapan masyarakat yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

“Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kabupaten Majene yang berkualitas;
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata;
4. Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur bagi percepatan aspek-aspek pembangunan;
6. Supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas aparatur didasarkan pada nilai-nilai kebenaran yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut dan menunjukkan apa yang menjadi cita-cita dan layanan terbaik Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, maka dirumuskan suatu visi seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019–2024 adalah sebagai berikut :

VISI

Adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, maka ditetapkan **Visi** yaitu :

“Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional Berkualitas Transparan Dan Terpercaya”

Dalam visi ini terkandung maksud bahwa berkeinginan untuk mengantisipasi tantangan, perkembangan dan tuntutan masyarakat, mendorong Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar untuk mempersiapkan diri tetap eksis dalam proses pembangunan. Namun perbaikan dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan menekan terjadinya kebocoran keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMD) 2019–2024. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan

MISI

1. Meningkatkan Citra, Harkat Dan Martabat Aparatur Pemerintah Yang Didukung Oleh SDM Yang Berkualitas
2. Meningkatkan SDM Aparatur Pengawasan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Dibidang Pengawasan
3. Meningkatkan Fungsi Pengawasan, Baik Pengawasan Fungsional Maupun Pengawasan Masyarakat
4. Meningkatkan Sistem Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Sejalan dengan visi maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.

2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar adalah :

Tabel. 2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi : Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional Berkualitas Transparan Dan Terpercaya			
No	Tujuan	Sasaran Starategis	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP
		Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan

2.3. Indikator Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dasar hukum penetapan IKU pada instansi pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER / 09 / M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel. 2.2. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	$n = \frac{\text{Jumlah OPD Yg Menerapkan SPIP}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Sekretariat
2.	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	$n = \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional Auditor}}{\text{Jumlah JFA berkompeten bid. pengawsan}} \times 100\%$	Sekretariat
3.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Hasil Penilaian	Sekretariat
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian	Sekretariat
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	Hasil Pemeriksaan BPK RI	Sekretariat

Tabel 2.1 Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Kondisi Kinerja pada Awal Priode RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	13,64%	20,45 %	27,27%	31,82%	38,64 %	45,45 %	45,45%	45,45%
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2 Plus	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
5.	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

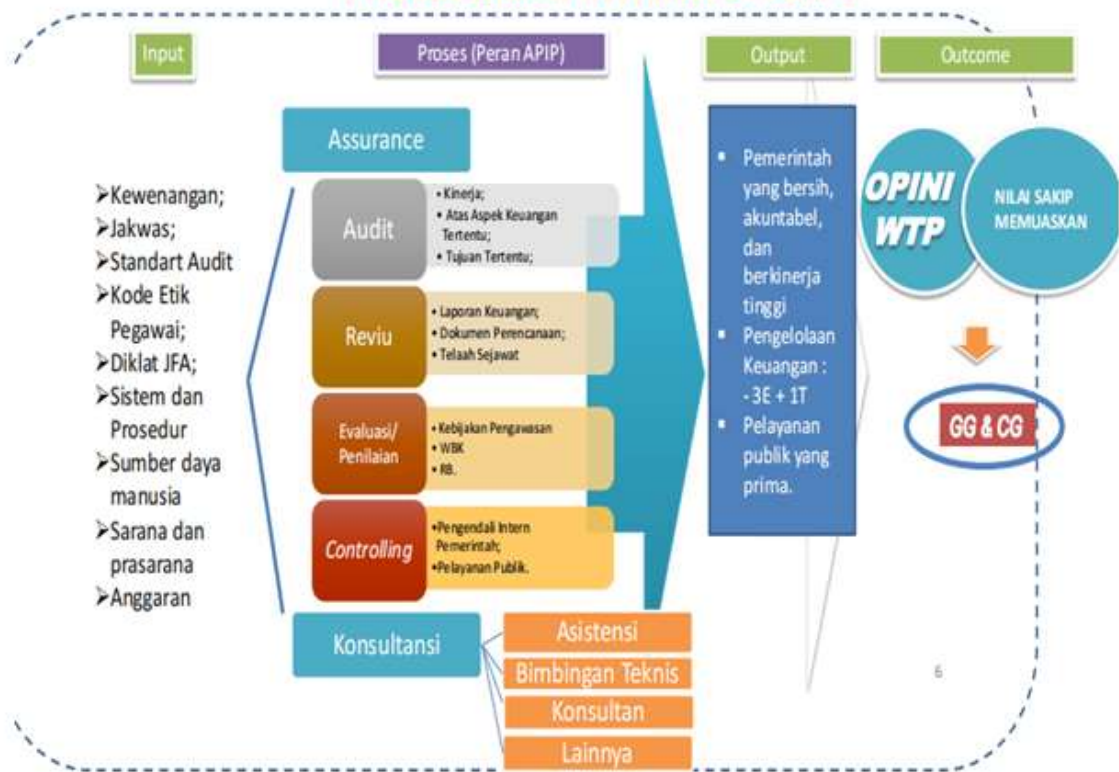


2	TERWUJUDNYA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)	Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP	31,82
0	MENINGKATNYA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG BERKOMPOTEN DALAM BIDANG PENGAWASAN	Tingkat Kapabilitas APiP	3,00
2	MENINGKATNYA KUALITAS MANAJEMEN PERKANTORAN	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	BAIK
1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS SATUN KERJA	Predikat Sahip Perangkat Daerah	13,13
	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLA KEUANGAN OPD	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP

PROSES BISNIS INSPEKTORAT

<p>Landasan Operasional Pelaksanaan Perumusan Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar</p>	<p>MISI : 4 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Modern</p>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 	Tujuan & Indikator	<p>Meningkatnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern</p>		
	Sasaran Strategis	<p>Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip)</p>	<p>Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Berkompoten Dalam Bidang Pengawasan</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran</p>
	Indikator Sasaran	<p>Meningkatnya Akuntabilitas Satun Kerja</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Pengelola Keuangan Opd</p>	
	Indikator Sasaran	<p>Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Spip</p>	<p>Tingkat Kapabilitas Apip</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder</p>
	Indikator Sasaran	<p>Predikat Sahip Perangkat Daerah</p>	<p>Opini Pengelolaan Keuangan</p>	

PROSES BISNIS INTI INSPEKTORAT



KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT TAHUN 2019 – 2024

	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
RPJMD	Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Moderen	Terwujudnya Pemerintah yang bersih akuntabel dan modern	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatkannya Tata kelola pemerintahan	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Opini Pengelola Keuangan

TUGAS POKOK INSPEKTORAT

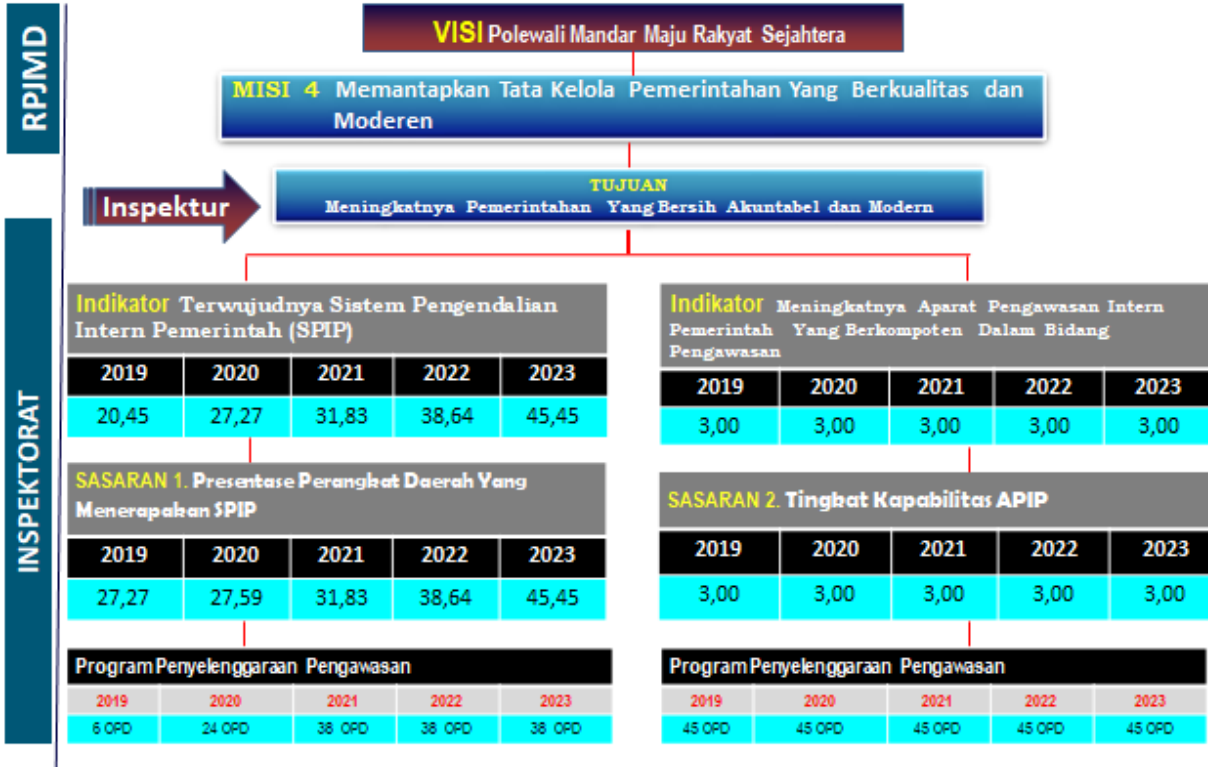
Melaksanakan Tugas Tugas lainnya Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, & Pengawasan Lainnya

	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Renstra	Meningkatnya Pemerintah Yang Bersih Akuntabel dan Modern	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Melaksanakan pemrksaan pada perangkat Daerah & Desa diLingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP
			Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan	Tingkat Kapabilitas Apip
			Meningkatkan Penyelesaian TL oleh Pemerintah Daerah atas Rekomendasi BPK,BPKP Inspektorat Prov. & Onspektorat Kab.	Opini Pengelolaan Keuangan

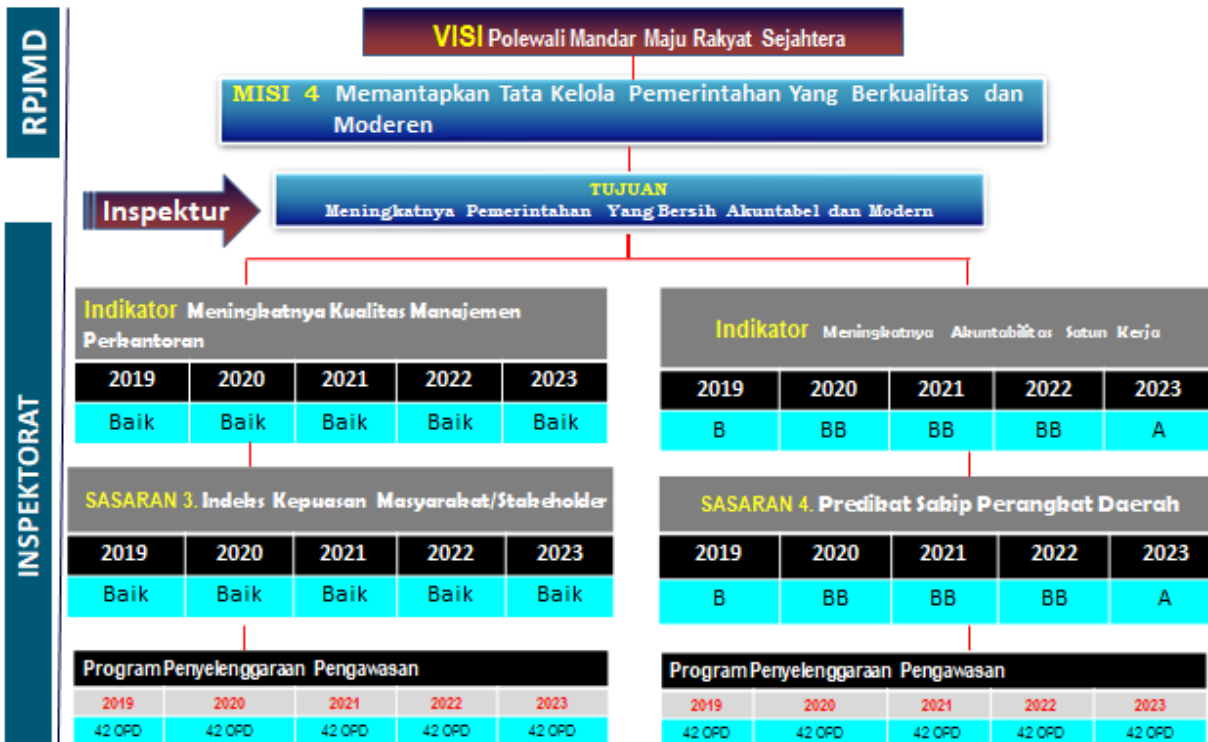
FUNGSI INSPEKTORAT

1. Perumus kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kebijakan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
5. Pelaksaaan administrasi Inspektorat
6. Pelaksaaan Tugas Lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan Tupoksi

CASCADING KINERJA INSPEKTORAT



CASCADING KINERJA INSPEKTORAT



Laporan Kinerja Triwulan IV 2021

INSPEKTORAT

Kegiatan Vaksin

Pada Dasarnya Laporan Kinerja Disusun Oleh Setiap Tingkatan Organisasi Dan Atau Setiap Tingkatan Jabatan Yang Telah Menyusun Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja Disajikan Dengan Memuat Informasi Tentang :

❖ **Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan :**

1. Perumus kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kebijakan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat
6. Pelaksanaan Tugas Lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan Tupoksi



2.3.1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Kinerja merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik, yang di dalamnya memuat program, kegiatan dan seluruh target kerja yang hendak dicapai dalam setahun yang akan datang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci yang meliputi indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan.



Tabel. 2.4. Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis pada Renstra Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Sasaran					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	persen	13,64	20,45	27,27	31,82	38,64	45,45
	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Skor	B	B	BB	BB	BB	A
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR INSPEKTORAT

Jl.k.h.Wahid Hasyim Nomor 12 Pekkabata Polewali Kode Pos 91315 Telepon (0428) 21201

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H.AHMAD SAIFUDDIN, SH,, MM**
Jabatan : **Inspektur Kabupaten Polewali Mandar**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANDI IBRAHIM MASDAR**
Jabatan : **Bupati Polewali Mandar**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali,.....

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ANDI IBRAHIM MASDAR

H.AHMAD SAIFUDDIN, SH,, MM
NIP.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : Inspektorat Polewali Mandar

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	31,82
2	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	3,00
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP

No	Program	Anggaran
1.	Program Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	2.449.999.900.00,-
JUMLAH		2.449.999.900.00,-

Polewali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ANDI IBRAHIM MASDAR

H.AHMAD SAIFUDDIN, SH,, MM
NIP.

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2021

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia	52 set	Sekertaris
		Jumlah Pegawai yang Mengikuti	48 org	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan yang Tersedia	6 jenis	
		Jumlah Jenis Alat – Alat Rumah Tangga yang Tersedia	8 jenis	
		Jumlah Makan Minum yang Tersedia	5 paket	
		Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	2 jenis	
		Jumlah Jenis Bahan Bacaan	3 jenis	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	13 lap	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	54 lap	
		Jumlah Jenis Meube	1 jenis	
		Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola	959 surat	
		Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik yang Terpenuhi	1600 m ²	
		Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih	7 Unit	
		Jumlah Unit Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin KIB	7 Unit	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Terpelihara	7 Unit	
		Jumlah Jenis mebeleur	1 Unit	
		Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	1 Unit	
		Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara	1600 m ²	
		Jumlah Jenis Mebeleur yang Terpelihara	4 jenis	
		Jumlah Dokumen PAK Auditor	56 dok	
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai Standar dan Tepat Waktu	1 dok			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.			
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	56 Lap	Sekertaris			
		Jumlah Laporan Hasil Reviu	24 Lap				
		Jumlah Laporan Hasil Reviu	3 Dok				
		Jumlah Laporan Monev	25 Lap				
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	5 Dok				
		Jumlah Monev	5 dok				
		Jumlah Pedoman Pengawasan dan SOP	15 Dok				
		Jumlah Pedoman Pengawasan dan SOP	10 Dok				
		Jumlah Laporan Pendampingan	12 Dok				
		Jumlah Laporan Tindak Lanjut	1 Dok				
		Jumlah dokumen RENJA / RENSTRA Tahunan yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	1 dok				
		3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	1 dok	Sekertaris
					Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	1 dok	

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2021

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PAK Auditor	56 Dok	Kasub Keuangan & Verifikasi
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai Standar dan Tepat Waktu	1 Dok	
		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	56 Lap	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu	24 Lap	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu	3 Dok	
		Jumlah Laporan Monev	25 Lap	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	5 Dok	
		Jumlah Monev		
		Jumlah Pedoman Pengawasan dan SOP	15 Dok	
		Jumlah Pedoman Pengawasan dan SOP	15 Dok	
		Jumlah Laporan Pendampingan	10 Dok	
		Jumlah Laporan Tindak Lanjut	12 Dok	
		2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja satuan kerja	
Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	1 dok			
Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	1 dok			
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia	52 set	Kasub Umum & Kepegawaian
		Jumlah Pegawai yang Mengikuti	48 org	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan yang Tersedia	6 jenis	
		Jumlah Jenis Alat – Alat Rumah Tangga yang Tersedia	8 jenis	
		Jumlah Makan Minum yang Tersedia	5 paket	
		Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	2 jenis	
		Jumlah Jenis Bahan Bacaan	3 jenis	
		Jumlah Jenis Bahan / Material yang Tersedia	17 jenis	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	13 lap	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	54 lap	
Jumlah Jenis Meubel	1 unit			



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR INSPEKTORAT

Jl.k.h.Wahid Hasyim Nomor 12 Pekkabata Polewali Kode Pos 91315 Telepon (0428) 21201

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JANUARI**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H.AHMAD SAIFUDDIN, SH., MM**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali,.....

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H.AHMAD SAIFUDDIN, SH., MM

JANUARI
NIP.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	318.603.000,00	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.966.600,00	APBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.991.800,00	APBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.693.700,00	APBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.440.000,00	APBD
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.454.452.122,00	APBD
7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.308.496,200,00	APBD
8	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	15.707.000,00	APBD
9	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	15.707.000,00	APBD
10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.000.000,00	APBD
11	Pendampingan dan Asistensi	312.098.400,00	APBD
JUMLAH		2.449.999.900,00	

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua
INSPEKTUR KABUPATEN

Pihak Pertama
SEKRETARIS

H.AHMADSAIFUDDIN, SH...MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 200003 1 084

H. JANUARI, S.Sos..M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19640101 198811 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR INSPEKTORAT

Jl.k.h.Wahid Hasyim Nomor 12 Pekkabata Polewali Kode Pos 91315 Telepon (0428) 21201

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **H.SUKANTO,S.Sos**
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. JANUARI, S.Sos.,M.Si**
Jabatan : Sektaris Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua
SEKRETARIS

Pihak Pertama
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

H. JANUARI, S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19640101 198811 1 003

H.SUKANTO,S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19651210198811 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.248.000,00	APBD
	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	296.355.000,00	
2	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.747.200,00	APBD
	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.550.000,00	
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.353.000,00	
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	3.840.000,00	
	f. Penyediaan Bahan / Material	23.988.900,00	
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.487.500,00	
3	a. Pengadaan Mebel	9.984.000,00	APBD
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.007.800,00	
4	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.795.000,00	APBD
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.998.700,00	
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.900.000,00	
5	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.230.000,00	APBD
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.475.000,00	
	c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000,00	
	d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.735.000,00	
Jumlah		776.695.100,00	APBD



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR INSPEKTORAT

Jl.k.h.Wahid Hasyim Nomor 12 Pekkabata Polewali Kode Pos 91315 Telepon (0428) 21201

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SUSI MAHYANTI, SP**
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. JANUARI, S.Sos.,M.Si**
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua
SEKRETARIS

Pihak Pertama
KASUBAG PERENCANAAN & PELAPORAN

H. JANUARI, S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19640101 198811 1 003

SUSI MAHYANTI, SP
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19730808 200212 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.589.800,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	4.339.800,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.600.000,00	APBD
Jumlah		15.529.600,00	

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua
SEKRETARIS

Pihak Pertama
KASUBAG PERENCANAAN & PELAPORAN

H. JANUARI, S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19640101 198811 1 003

SUSI MAHYANTI, SP
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19730808 200212 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR INSPEKTORAT

Jl.k.h.Wahid Hasyim Nomor 12 Pekkabata Polewali Kode Pos 91315 Telepon (0428) 21201

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MARSYAN,ST**
Jabatan: Plt. Kasubag Keuangan dan Verifikasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. JANUARI, S.Sos.,M.Si**
Jabatan: Sekretaris Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua
SEKRETARIS

Pihak Pertama
Plt. KASUBAG KEUANGAN & VERIFIKASI

H. JANUARI, S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19640101 198811 1 003

MARSYAN,ST
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19740409 200604 1 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

No	Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.442.978,522	APBD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.199.600,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.274.000,00	APBD
2.		692.189.400,00	APBD
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	276.421.400,00	APBD
	Reviu Laporan Kinerja	185.868.400,00	APBD
	Reviu Laporan Keuangan	154.017.000,00	APBD
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		APBD
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	15.707.000,00	
3.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	5.000.000,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	5.000.000,00	APBD
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	APBD
	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	307.098.400,00	APBD
Jumlah		5.778.655.322,00	

Pihak Kedua
SEKRETARIS

H. JANUARI, S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19640101 198811 1 003

Polewali, 15 Februari 2021
Pihak Pertama
Plt. KASUBAG KEUANGAN & VERIFIKASI

MARSYAN,ST
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19700409 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR INSPEKTORAT

Jl.k.h.Wahid Hasyim Nomor 12 Pekkabata Polewali Kode Pos 91315 Telepon (0428) 21201

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **BASRI BAGU, SP.,MM**
Jabatan: Irbanwas Setda, DPR dan Penanganan Khusus

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM**
Jabatan: Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 29 Januari 2021

Pihak Kedua
INSPEKTUR KABUPATEN

Pihak Pertama
IRBANWAS SETDA, DPR & PENANGANAN KHUSUS

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 200003 1 084

BASRI BAGU, SP.,MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19630704 198803 1 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Pemeriksaan Khusus Kerugian Negara / Berindikasi Korupsi	15.707.000,00	APBD
2.	Pemantauan Aksi Pencegahan Korupsi	10.996.000,00	APBD
3.	Pemeriksaan Khusus Pengaduan Perceraian	83.119.600,00	APBD
4.	Pemeriksaan Khusus Investigasi	55.000.000,00	APBD
5.	Pemeriksaan Khusus Pengaduan Masyarakat Terhadap Perangkat Daerah	55.000.000,00	APBD
6.	Pemeriksaan Khusus Pengaduan Masyarakat Terhadap Perangkat Desa	27.500.000,00	APBD
Jumlah		247.322.600,00	

Polewali, 29 Januari 2021

Pihak Kedua
INSPEKTUR KABUPATEN

Pihak Pertama
IRBANWAS SETDA, DPR &
PENANGANAN KHUSUS

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 200003 1 084

BASRI BAGU, SP.,MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19630704 198803 1 021



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR INSPEKTORAT

Jl.k.h.Wahid Hasyim Nomor 12 Pekkabata Polewali Kode Pos 91315 Telepon (0428) 21201

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **AGUNG ARIF, S.IP.,M.Si**
Jabatan : Irbanwas Lembaga Teknis

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 29 Januari 2021

Pihak Kedua
INSPEKTUR KABUPATEN

Pihak Pertama
IRBANWAS LEMBAGA TEKNISs

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 200003 1 084

AGUNG ARIF, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19700809 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Reviu ASB dan SSH	51.390.000,00	APBD
2.	Reviu Dana DAK	. 114.485.000,00	APBD
3.	Reviu Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	26.708.400,00	APBD
4.	Reviu RKA OPD	. 83.838.000,00	APBD
5.	Reviu Keuangan Kabupaten	. 58.390.000,00	APBD
6.	Reviu Keuangan OPD	. 55.978.400,00	APBD
7.	Reviu Penyerapan Anggaran	. 70.254.000,00	APBD
8.	Evaluasi Pelayanan Publik	. 13. 750.000,00	APBD
Jumlah		474.793.800,00	

Polewali, 29 Januari 2021

Pihak Kedua
INSPEKTUR KABUPATEN

Pihak Pertama
IRBANWAS LEMBAGA TEKNIS

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 200003 1 084

AGUNG ARIF, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19700809 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR INSPEKTORAT

Jl.k.h.Wahid Hasyim Nomor 12 Pekkabata Polewali Kode Pos 91315 Telepon (0428) 21201

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM**
Jabatan : Irbanwas Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 29 Januari 2021

Pihak Kedua
INSPEKTUR KABUPATEN

Pihak Pertama
IRBANWAS KEC., KEL. & DESA

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 200003 1 084

H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19701229 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Pemeriksaan Dana Desa	159.861.400,00	APBD
2.	Pemeriksaan OPD Kecamatan dan Kelurahan	115.060.600,00	APBD
3.	Evaluasi LAKIP	23.600.000,00	APBD
4.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	13.750.000,00	APBD
Jumlah		312.272.000,00	

Polewali, 29 Januari 2021

Pihak Kedua
INSPEKTUR KABUPATEN

Pihak Pertama
IRBANWAS KEC., KEL. & DESA

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 200003 1 084

H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19701229 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR INSPEKTORAT

Jl.k.h.Wahid Hasyim Nomor 12 Pekkabata Polewali Kode Pos 91315 Telepon (0428) 21201

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD RAUF, S.Sos.,MT**
Jabatan : Irbanwas Dinas – Dinas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 29 Januari 2021

Pihak Kedua
INSPEKTUR KABUPATEN

Pihak Pertama
IRBANWAS DINAS - DINAS

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 200003 1 084

AHMAD RAUF, S.Sos.,MT
Pangkat : Pembina
NIP. 19650215 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Anggaran	Ket.
1.	Pemeriksaan Dana BOS	218.540.600,00	APBD
2.	Pemeriksaan OPD (PBJ, Probita, Kinerja)	183.060.000,00	APBD
Jumlah		401.600.600,00	

Polewali, 29 Januari 2021

Pihak Kedua
INSPEKTUR KABUPATEN

Pihak Pertama
IRBANWAS DINAS - DINAS

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 200003 1 084

AHMAD RAUF, S.Sos.,MT
Pangkat : Pembina
NIP. 19650215 200003 1 003

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Polewali Mandar yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003.

Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan serta target dan dari indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dipaparkan pula keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, terdapat 5 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja beserta terget kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021. Untuk mengetahui sejauhmana pencapaian kinerja tersebut, maka diperlukan pengukuran kinerja yang akan dibahas, dievaluasi dan dianalisis dalam BAB ini. Laporan dimaksud diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian target indikator masing-masing sasaran, perkembangan atau perbandingan kondisi capaian tahun-tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan, program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target serta aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan pada masing- masing sasaran.

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Renja.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pada tahun 2021, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran strategis yang memperlihatkan hasil yang cukup baik.

a. Presentase Perangkat Daerah yang merapkan SPIP

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan monitoring Sistem Penerapan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap sejumlah perangkat daerah yang telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai berikut :

Tabel : 3 Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP Tahun 2020

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Kriteria	Skor
1	Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan persandian	Terdefinisi	3,18
2	Dinas transmigrasi, tenaga kerja dan ESDM	Terdefinisi	3,08

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Kriteria	Skor
3	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Terdefinisi	3,30
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terdefinisi	3,30
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terkelola dan terukur	4,30
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terdefinisi	3,09
7	Dinas Sosial	Terdefinisi	3,09
8	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Terkelola dan terukur	4,19
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terkelola dan terukur	4,01
10	Satuan Polisi Pamong Praja	Terkelola dan terukur	4,01

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar melakukan evaluasi atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada empat belas (14) organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menilai penyelenggaraan SPIP pada organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten Polewali Mandar.
2. Memberikan keyakinan kepada Pimpinan Instansi bahwa penyelenggaraan SPIP telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkan melalui kegiatan yang efisien, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap perundang- undangan.
3. Memberikan saran perbaikan kepada Pimpinan Instansi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan SPIP pada organisasi perangkat daerah (OPD).

Untuk mencapai tujuan tersebut penilaian penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan ruang lingkup penilaian yang meliputi lima (5) unsur dan dua puluh lima (25) sub unsur SPIP yaitu :

1. Lingkup Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Penilaian penyelenggaraan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dengan pendekatan kuantitatif mengacu pada 25 sub unsur penyelenggaraan SPIP yaitu :

No	Unsur SPIP	Jumlah Sub Unsur	Bobot
1	Lingkup Pengendalian	8	30%
2	Penilaian Risiko	2	20%
3	Kegiatan Pengendalian	11	25%
4	Informasi dan Komunikasi	2	10%
5	Pemantauan	2	15%
Jumlah		25	

Simpulan hasil penilaian tingkat maturisasi penyelenggaraan SPIP dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan hasil skor akhir untuk masing-masing fokus penilaian (sub unsur) dengan gradasi nilai sebagai berikut :

Kategori Maturitas	Level Maturitas	Interval Nilai
Belum ada	0	$0 < \text{Skor/Nilai} < 1,0$
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Skor/Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Skor/Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Skor/Nilai} < 4,0$
Terkelola dan terukur	4	$4,0 \leq \text{Skor/Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$4,5 \leq \text{Skor/Nilai} < 5,0$

Dari hasil penilaian tingkat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kabupaten Polewali Mandar dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP di kabupaten Polewali Mandar telah memenuhi kriteria "**terdefinisi**" dan sudah ada 3 (tiga) OPD yang telah mencapai kategori "**terkelola dan terukur**", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek pengendalian intern dan terdokumentasi dengan cukup baik. Namun masih ditemukan berbagai kelemahan atas komitmen penyelenggaraan SPIP, untuk itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pemenuhan parameter sebagai indikator dari penerapan SPIP itu sendiri. Kelemahan-kelemahan ini disebabkan berbagai macam faktor antara lain

:Minimnya anggaran yang dialokasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

1. Sumber daya manusia masih sangat terbatas sehingga pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh satu tim pengawasan terhadap beberapa OPD. Sehingga hal ini mengakibatkan masih banyaknya parameter yang belum maksimal dilakukan akibat dari keterbatasan waktu pelaksanaan evaluasi.

Capaian sasaran terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 di 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kabupaten Polewali Mandar sebesar 31,11 %.

b. Tingkat Kapabilitas APIP

Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, Pemerintah telah mengamatkan didalam PP nomor 60 Tahun 2008 supaya seluruh tingkat pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif.

Hal ini dipertegas oleh Presiden Republik Indonesia pada rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern dengan tema Peningkatan Kapabilitas APIP tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta. Salah satu perintah Presiden adalah agar kapabilitas APIP di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2019 berada pada Level 3 (Integrated), jika dinilai dengan menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA) tahun 2009. Sebagaimana diketahui dalam kerangka Internal Audit Capability Model (IACM) kapasitas pengawasan intern dikelompokkan menjadi lima tingkatan yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Dengan mengacu kepada model yang telah dikembangkan oleh Internal Audit Capability Model (IACM) yaitu Internal Audit Capability Model (IACM) dan telah disesuaikan seperlunya yang mencakup elemen-elemen tata kelola secara menyeluruh dan keterkaitannya dengan pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. Penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada Internal Audit Capability Model mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

1. Peran dan layanan APIP (Services and Role of Internal Auditing)
2. Pengelolaan SDM (People Management)
3. Praktek Profesional (Professional Practices)
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability)
5. Budaya dan hubungan organisasi (Organizational Relationship and Culture)
6. Struktur Tata Kelola (Governance Structures)

Tingkat kapabilitas APIP yang telah diraih oleh Inspektorat kabupaten Polewali Mandar telah mencapai pada tingkat Level 3 (Integrated). Hal ini telah diperoleh sejak tahun 2019, dan tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar berhasil memperhankan tingkat kapabilitas APIP pada tingkat Level 3 (Integrated).

c. Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder

Masyarakat membutuhkan pelayanan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Demikian pula pada Inspektorat kabupaten Polewali Mandar yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepuasan terhadap layan masyarakat/ stakeholder. Kepuasan ini dapat terwujud apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan atau lebih baik dari standar pelayanan tersebut.

Inspektorat merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha daerah lainnya dalam mewujudkan **Good Governance**. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016.

Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga terjadi pada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. penyelesaian pengaduan masyarakat oleh instansi penyelenggara layanan disebut dengan istilah complain handing system yang sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang telah meninstruksikan kepada setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola penagaduan pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Inspektorat kabupaten Polewali Mandar telah mencapai kategori **“baik”** dalam hal pelayanan publik, karena telah disediakan Standar Pelayanan Operasional dalam penanganan pelayanan publik. Dan setiap pengaduan masyarakat segera ditindaklanjuti dengan membentuk tim pemeriksaasn khusus dalam penanganan pengaduan.

Namun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengaduan masih terdapat kelemahan yang disebabkan oleh sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar seperti :

1. Kondisi gedung kantor Inspektorat kabupaten Polewali Mandar sudah tidak layak huni dan perlu perbaikan secara maksimal agar masyarakat/stakeholder yang berkunjung ke Inspektorat kabupaten Polewali Mandar dapat merasa nyaman dalam menyampaikan inspirasi.

2. Anggaran yang masih sangat terbatas, sehingga pengaduan masyarakat yang semakin meningkat dari tahun ke tahun kadang tidak dapat ditindak lanjuti segera. Hal ini disebabkan karena anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut tidak memadai.
3. Standar Pelayanan Operasional (SOP) yang telah dibuat belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan karena SDM yang ada di Inspektorat kabupaten Polewali Mandar masih kurang memadai.

d. Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kabupaten Polewali Mandar sejak dua tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 telah memperoleh predikat **“B”** dengan persentase penilaian sebesar **66,12%** atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian RB yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 19 Februari 2019. Dan pada penilaian tahun 2020, kabupaten Polewali Mandar kembali memperoleh predikat **“BB”** dengan persentase penilaian sebesar **“70,17”** yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 24 Februari 2020. Secara umum tujuan dilaksanakan evaluasi penilaian SAKIP ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi tentang implemetasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

e. Opini Pengelolaan Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagai badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah atau badan lain, diberi kewenangan untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah, yang kemudian memuat opini antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (*disclaimer of opinion*). Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1), yaitu : Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemberian opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan pada pertimbangan:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Efektivitas Pengendalian Intern;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan
- d. Pengungkapan yang Lengkap (Full Disclosure).

Keempat kriteria pemeriksaan di atas akan berdampak terhadap opini yang akan diberikan kepada LKPD yang bersangkutan, semakin banyak jumlah pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka opini yang diberikanpun akan semakin buruk. Pelanggaran yang ditemukan akan dibandingkan dengan kriteria tersebut kemudian ditentukan tingkat materialitasnya.

Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/ masyarakat).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas (LAK) dan
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Neraca;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- f. Laporan Arus Kas (LAK) dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pelaksanaan Akuntansi keuangan daerah tersebut diperlukan keahlian khusus dibidang akuntansi yang ditunjang dengan program aplikasi komputer (SIMDA) yang handal serta dipayungi dengan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, yang kemungkinan akan lebih menghambat dalam memperoleh Opini WTP karena diperlukan sumberdaya yang memahami Akuntansi Berbasis Akrual.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar merupakan predikat yang telah disandang seraca berturut-turut selama 4 tahun terakhir. Sejak audit terhadap LKPD Polewali Mandar tahun 2016. Pada tahun-tahun sebelumnya, opini BPK atas LKPD Polewali Mandar masih pada predikat Wajar Dengan Pengecualian. Pada saat itu predikat WTP masih

tersandung oleh karena penyajian data laporan asset yang belum mampu meyakinkan tim auditor BPK RI kala itu.

Opini WTP ini juga akan memberi kontribusi yang besar terhadap penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Polewali Mandar, selain itu opini WTP juga menjadi potensi untuk mendapatkan reward berupa peningkatan nilai Dana Insentif Daerah.

Meskipun mendapatkan opini WTP bukan berarti bahwa pada saat Tim Auditor melakukan audit terhadap LKPD Polewali Mandar sama sekali tidak terdapat temuan- temuan. Akan tetapi temuan-temuan tersebut lebih pada hal-hal yang bersifat administratif, tidak ada temuan yang secara material menyebabkan kerugian negara/daerah

3.1.1 Capaian Kinerja Indikator Utama

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Terwujudnya system pengendalian internal pemerintah (APIP)	Presentase perangkat daerah yg menerapkan SPIP	31,62%	31,11 %	98,38%
Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Terpenuhi
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Terpenuhi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	Terpenuhi
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	Terpenuhi

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

- Capaian Kinerja Indikator

Sasaran 1	Terwujudnya system pengendalian internal pemerintah (SPIP)
------------------	--

Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang Pengawasan, dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2021 pencapaian sasaran tersebut sebesar 31,82%. Selengkapnya dapat dilihat Pencapaian kinerja Utama sebagai berikut:

IKU 1	Presentase Perangkat Daerah Yg Menerapkan SPIP
--------------	--

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja

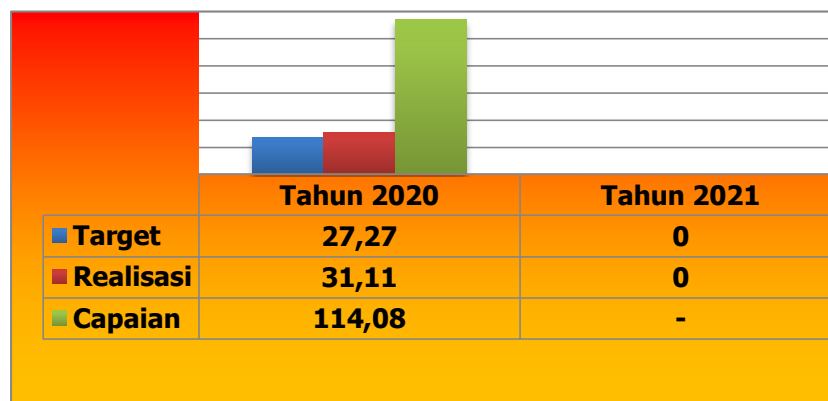
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Presentase perangkat daerah yg menerapkan SPIP	31,82%	31,11 %	98,38%

- **Perbandingan Capaian Indikator Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Dalam 2 Tahun Terakhir**

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dalam 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase perangkat daerah yg menerapkan SPIP	27,27%	31.11%	114.08%	31,82%	31,11%	98,38%

Grafik 3.1. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021



- **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra**

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Indikator Presentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP dengan Target Akhir Periode Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya system pengendalian internal pemerintah (APIP)	Presentase perangkat daerah yg menerapkan SPIP	31.82	31,11	98,38

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilaksanakan**

Realisasi kinerja untuk indikator ini 31,11 % dari target yang direncanakan namun nilai capainya 98,38 % sama dari tahun sebelumnya. Hal ini mungkin disebabkan karena efek dari pandemi Covid-19 .

Sasaran 2

Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan

Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang Pengawasan, dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2021 pencapaian sasaran tersebut 3.00 Selengkapnya dapat dilihat Pencapaian kinerja Utama sebagai berikut:

IKU 2

Tingkat Kapabilitas APIP

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Kapabilitas APIP	3.00	3.00	3.00

- **Perbandingan Capaian Indikator Presentase Tingkat Kapabilitas APIP Dalam 2 Tahun Terakhir**

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dalam 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kapabilitas APIP	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

- **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra**

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Indikator Presentase Tingkat Kapabilitas APIP dengan Target Akhir Periode Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	3.00	3.00	3.00

Grafik 3.1. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021



Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang Pengawasan, dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2021 pencapaian sasaran tersebut Baik Selengkapny dapat dilihat Pencapaian kinerja Utama sebagai berikut:

IKU 3

Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik

- **Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder Dalam 2 Tahun Terakhir**

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dalam 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Terpenuhi	Baik	Baik	Terpenuhi

- **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra**

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder dengan Target Akhir Periode Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik

Sasaran 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang Pengawasan, dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2021 pencapaian sasaran tersebut BB Selengkapnya dapat dilihat Pencapaian kinerja Utama sebagai berikut:

IKU 4

Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB

- **Perbandingan Capaian Indikator Predikat SAKIP perangkat Daerah dalam 2 Tahun Terakhir**

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dalam 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	Terpenuhi	BB	BB	Terpenuhi

- **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra**

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan Target Akhir Periode Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB

Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang Pengawasan, dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2021 pencapaian sasaran tersebut WTP Selengkapny dapat dilihat Pencapaian kinerja Utama sebagai berikut:

IKU 5

Opini Pengelolaan Keuangan

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP

- **Perbandingan Capaian Indikator Opini Pengelolaan Keuangan dalam 2 Tahun Terakhir**

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dalam 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

- **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra**

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Indikator Opini Pengelolaan Keuangan dengan Target Akhir Periode Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perencanaan Kinerja**

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 telah berupaya mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut ::

1. Program *Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	BB	Terpenuhi
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Terpenuhi

Pada Program *Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* , target kinerja dan anggaran untuk tahun 2021 sebesar 100% dengan anggaran Rp5.231.083.327.00,- Adapun realisasi anggaran untuk program ini yaitu 98.73% atau Rp7.005.603.382.00,- dengan capaian kinerja sebesar **73.91%**

Adapun Kegiatan-Kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program *Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* adalah :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah
- 6) Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah.

2. Program *Penyelenggaraan Pengawasan*.

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP	31,11 %	31,82 %	31,11%	98,38 %
2	Opini pengelolaan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP

Pada Program *Penyelenggaraan Pengawasan*, target kinerja dan anggaran untuk tahun 2021 sebesar 100% dengan anggaran Rp1.828.101.656.00,- Adapun realisasi anggaran untuk program ini yaitu 98.50% atau Rp7.005.603.382.00,- dengan capaian kinerja sebesar **26.09%**

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Program *Penyelenggaraan Pengawasan* adalah :

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- 2) Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

3. Program *Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi*.

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	BB	BB	BB	BB

Pada Program *Perumusan kebijakan, Pendampingan dan asistensi* target kinerja dan anggaran untuk tahun 2021 sebesar 100% dengan anggaran Rp368.041.256.00,- Adapun realisasi anggaran untuk program ini yaitu 99.97% atau Rp7.005.603.382.00,- dengan capaian kinerja sebesar **5.25%**

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Program **Perumusan kebijakan, Pendampingan dan asistensi** adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan
- 2) Pedampingan dan asistensi.



Gambar.



Gambar.

Laporan Kinerja Triwulan IV 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	BIADANG PENAGAWASAN	Rp. 1.864.369.400,-	Rp.1. 828.101.656,-

Kegiatan Pengawasan

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi belanja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 sebesar Rp 7.095.452.727,- Dari jumlah tersebut terealisasi atau 98,73.% sebesar Rp 7.005.603.382,- dari alokasi belanja yang dianggarkan sebagai berikut :

Tabel 3.20. Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Capaian (%)
I	BELANJA	5.231.083.327	5.177.501.725	53.581.603	98.98
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Ddaerah	15.529.600	15.529.600	-	100.00
2	Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.656.926.427	4.613.914.906	43.011.521	99.08
3	Belanja Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	144.303.000	144.026.300	276.200	99.81
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.820.300	166.679.536	140.764	99.92
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.991.800	37.984.000	7.800	99.98
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.693.700	154.714.202	8.979.498	94.51
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.818.500	44.653.180	1.165.320	97.46
II	BELANJA	1.496.215.400	1.828.101.656	-	100.00
Program Penyelenggaraan Pengawasan					
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.496.215.400	1.496.215.400.	-	100.00
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	-
III	BELANJA	368.154.000	368.041.256	112.744	99.97
Program Pengawasan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi					
1	Perumusan Kebijakan Teknis Ibidang Pengawasan & Fasilitas Pengawasan	-	-	-	-
2	Pendampingan Dan Asistensi	368.154.000	368.041.256	112.744	99.97
BELANJA I + II + III		7.095.452.727	7.041.758.380	53.694.347	99.24

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja Inspektorat kabupaten polewali mandar cukup baik karena mampu menyerap anggaran sebesar Rp7.095.452.727,- .% dari alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp7.005.603.382,dengan penurunan penyerapan anggaran sebesar 98,73 % dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 penyerapan anggaran sebesar 98,57%. Pada tahun ini ada beberapa kegiatan yang anggarannya tidak dapat terserap dengan baik

Hasil analisis keuangan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar diperoleh persentase kurang dari 100% dari target yang direncanakan. Untuk Belanja diperoleh persentase sebesar 98,73%.

BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Capaian kinerja Tahun 2021 Inspektorat kabupaten polewali mandar sebesar 98,73.%. Capaian tersebut merupakan hasil rata-rata capaian seluruh IKU yang telah diperjanjikan di awal tahun. IKU sasaran pertama memperoleh capaian 98,38 % dan IKU pertama sasaran kedua memperoleh capaian Level 3, IKU dua memperoleh Capaian Baik Sasaran 3 IKU tiga memperoleh Baik Sasaran 4 IKU empat memperoleh BB. Sasaran 5 IKU 5 memperoleh Nilai WTP. Dalam mengatasi kendala yang terjadi pada semester I tahun 2021, Inspektorat kabupaten polewali mandar terus mengedepankan kerja sama yang baik antar seluruh stakeholder dan berupaya melakukan perbaikan dalam pelaksanaan setiap kegiatan pengawasan . Untuk itu Sekretariat inspektorat kabupaten polewali mandartelah melakukan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan melalui hasil pemetaan risiko di lingkungan inspektorat kabupaten polewali mandar ,yang digunakan sebagai panduan untuk meminimalisir risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi, dan menyukseskan seluruh pelayanan yang diberikan kepada stakeholders.

Disamping itu, pengelolaan manajemen inspektorat kabupaten polewali mandartelah perlu memadukan beberapa elemen terkait sistem pembinaan pengawasan , sistem pemantauan, dan sistem pelaporannya. Sejalan dengan saran penyempurnaan dari Kementerian PANRB guna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kinerja, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis sehingga dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan, Sekretariat inspektorat kabupaten polewali mandar telah secara berkelanjutan melakukan penguatan e-government melalui penyempurnaan sistem informasi yang telah diimplementasikan selama ini.

Melalui penyempurnaan sistem informasi tersebut, diharapkan dapat mendukung upaya reformasi proses kerja internal inspektorat kabupaten polewali mandartelah melalui efisiensi, dan memperkuat fungsi organisasi dalam memberikan dukungan manajemen kepada Bupati dan Wakil.

Pada sisi lain, dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi saat ini, menyebabkan banyak perubahan, baik dari sisi tatanan kerja maupun anggaran. paradigma tatanan kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Terlihat dari percepatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP yang telah menjadi kebutuhan pada semua level birokrasi, sebagai konsekuensi masifnya praktik bekerja dari rumah atau work from home. Rapat-rapat koordinasi juga diselenggarakan menggunakan teknologi digital melalui video conference sehingga lebih efektif dan efisien dari sisi waktu dan biaya.

Tantangan inspektorat kabupaten polewali mandartelah ke depan adalah memperkuat sumber daya manusia yang kompeten, dapat berinovasi, dan beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi digital dalam berkinerja ditengah pandemi covid-19,

sehingga dapat memberikan outcome yang bermanfaat bagi inspektorat kabupaten polewali mandartelah dalam memberikan dukungan manajemen kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, Laporan Capaian Kinerja Semester I inspektorat kabupaten polewali mandartelah Tahun 2021 ini akan menjadi bahan evaluasi dan digunakan untuk menyempurnakan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

